

**PROSES PENERBITAN BUKU PEMILIK KENDARAAN BERMOTOR  
DUPLIKAT DIREKTORAT LALU LINTAS KEPOLISIAN DAERAH  
RIAU**

**PANDHU RAHMANDANU  
HERY SURYADI,S.Sos, M.Si.  
pandhu.rahmandanu@yahoo.com  
08127646280**

Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Riau,  
Kampus Bina Widya Km. 12,5 Simpang Baru Panam Pekanbaru.Telp (0761)  
63277.

**Abstract:** Proof of Motor Vehicle owners will certainly immediately know that it is a proof of vehicle ownership as proof of legal ownership and the source of identification. interesting not all know the process of getting proof of vehicle ownership (reg) this or breakthroughs that made the agency issued a policy that is given the authority to administer the Police of the Republic of Indonesia through the Directorate of Traffic Police of the Republic of Indonesia. Duplicate BPKB Publishing process with an online system service improvement strategies with the police in order for the issuance of reg can be effective, efficient and powerful results

for  
This study aims to describe the implementation of Book Publishing Process Owner Vehicle Traffic Police Directorate of Duplicates Riau. The research was conducted in the city of Pekanbaru police agencies through the Directorate of Traffic. The data obtained by interviews was analyzed qualitatively and with interpretation.

In line with the above research objectives, the research is BPKB Section Chief, Section of reg affairs officer, Pamin Si BPKB, Police, Police, Head of Print Media and society in general, which is the scope of the relationship system in the process of issuing the duplicate reg. As many as 43 samples taken from a population while the sampling technique used in this study is the purposive sampling technique. The data obtained directly from informants through observation and interviews. Then secondary data is data that has been processed in the form of text and dokumentasi.

The results showed that the Motor Vehicle Owners Book Publishing Duplicate Directorate of Traffic Police Riau who use the online system is not running or has been able to accommodate a maximum of petition or request the entire community. Top level system process using 10 counters publishing arrangement with the specified requirements are too burdensome dianggapkan partly applicant and convoluted procedural passed, so the achievement of the publishing process BPKB Duplicate yet reached maximum service process or have not reached a pretty good process.

**Keywords:** analysis of the process of publishing, services, regional police Ditlantas riau.

Dinamika perkembangan di semua lini pembangunan semakin meningkat yang berbanding luas dengan mobilitas kegiatan masyarakat, menyikapi hal tersebut tentunya perlu diimbangi dengan langkah profesional dan strategis khususnya bagi organisasi Kepolisian Republik Indonesia (Polri) yang memiliki tugas pokok sebagai pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat. Dalam konteks yang lebih spesifik pada fungsi pelayanan kepada masyarakat sangat perlu diperhatikan dan dilakukan perbaikan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan.

Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) telah diketahui bahwa itu merupakan bukti kepemilikan kendaraan bermotor baik roda dua ataupun lebih yang merupakan surat berharga yang dimiliki individu ataupun atas nama perusahaan dan badan hukum. Perlu dipahami pengertian Buku Pemilik Kendaraan Bermotor adalah sebagai tanda bukti kepemilikan yang sah dari kendaraan bermotor dan merupakan sumber identifikasi (asal usul, riwayat maupun data yang menyangkut pemilik, domisili dan fisik ranmor). Isi buku BPKB terdiri dari identitas kendaraan bermotor (ranmor), identitas kepemilikan, data pabean dan sejarah kepemilikan kendaraan bermotor (ranmor).

Penerbitan BPKB menunjukkan salah satu substansi pelayanan Polri kepada masyarakat, dimana dalam pelaksanaannya di lapangan masih banyak ditemukan kekurangan-kekurangan yang signifikan sehingga menimbulkan imej yang kurang baik bagi Polri pada umumnya. Ini merupakan tantangan yang harus dijawab dengan solusi yang tepat sehingga mengenai sasaran. Dalam rangka menunjang sistem pemerintahan yang kuat diperlukan sistem kerja yang cepat, tepat, akurat dan akuntabel.

Langkah dan terobosan kebijakan yang diambil khususnya Direktorat Lalu Lintas Polda Riau merupakan salah satu pencapaian terwujudnya pelayanan yang prima kepada masyarakat. Dilihat dari kenyataan selama ini, fenomena kebijakan yang ditempuh dalam penerbitan Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor dinilai masih jauh dari harapan masyarakat sebagai publik yang membutuhkan pelayanan kepolisian yang tidak berimbang dengan tuntutan negara yang mewajibkan setiap warga negara patuh terhadap ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut teori George Edward III (1980:1) implementasi kebijakan merupakan proses yang krusial karena seberapa baiknya suatu kebijakan, kalau tidak dipersiapkan dan direncanakan dengan baik implementasinya apa yang menjadi tujuan kebijakan publik tidak akan terwujud, kalau kebijakan tidak dirumuskan dengan baik apa yang menjadi tujuan kebijakan tidak tercapai sehingga perumusan kebijakan harus dipersiapkan dengan baik. Menurut Edward III ada dua karakteristik utama dalam biokrasi yaitu prosedur kerja baku standar atau *Standard operating prosedur* (SOP) dan pragmentasi.

*Standard Operating Prosedure* berkembang sebagai tanggapan internal terhadap waktu yang terbatas sumber dari pelaksana serta keinginan untuk

keseragaman dalam bekerjanya organisasi yang kompleks dan tersebar luas. SOP mungkin menghalangi implementasi kebijakan baru yang membutuhkan cara-cara kerja atau tipe-tipe personil baru untuk melaksanakan kebijakan baru, semakin besar pula SOP menghambat implementasi kebijakan. Namun SOP juga memiliki manfaat dimana organisasi dengan prosedur perencanaan yang baik dan kontrol yang sejalan dengan program yang memungkinkan, akan lebih dapat menyesuaikan dengan tanggung jawab yang baru daripada birokrasi tanpa mempunyai ciri tersebut.

## METODE

Jenis penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Peneliti berusaha untuk mengungkapkan fakta sesuai dengan kenyataan yang ada tanpa melakukan intervensi terhadap kondisi yang terjadi. Pada penelitian kualitatif dengan metode deskriptif adalah suatu jenis penelitian yang bertujuan untuk membuat deskriptif (gambaran) dan hubungan antara fenomena yang diselidiki. Penelitian deskriptif tidak memberikan perlakuan, manipulasi atau pengubahan pada variabel-variabel bebas, tetapi menggambarkan suatu kondisi apa adanya.

## HASIL

### A. Identitas Responden

Adapun data tentang responden yang meliputi pertanyaan tentang kebijakan yang diambil dalam Penerbitan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor Duplikat Direktorat Lalu Lintas Kepolisian Daerah Riau yang diberikan kepada 43 Responden yang dipilih. Hasil pertanyaan tersebut dapat di sajikan sebagai berikut:

**Tabel 1.2 Jenis Kelamin Responden**

No	Responden	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-Laki	Perempuan	
1	Kepala Seksi BPKB	1 (100%)	-	1 (100%)
2	Paur Si BPKB	1 (100%)	-	1 (100%)
3	Pamin Si BPKB	2 (100%)	-	2 (100%)
4	Reserse	1(100%)	-	1 (100%)
5	Polsek	1 (50%)	1 (50%)	2 (100%)
6	Pimpinan Media Cetak	1(100%)	-	1(100%)
7	Pemohon BPKB diterima	15 (60%)	10 (40%)	25 (100%)
8	Pemohon BPKB ditolak	7 (70%)	3 (30%)	10 (100%)
Jumlah		29 (67,44%)	14 (32,56%)	43 (100%)

Sumber : Data olahan Penelitian 2011

Dari tabel 3.1 di atas dapat diketahui bahwa responden pada umumnya responden laki-laki 29 orang dengan persentase (67,44%), sedangkan responden

perempuan sebanyak 14 orang dengan persentase (32,56%). Responden dari masyarakat, pemohon yang diterima, laki-laki sebanyak 15 orang sedang perempuan sebanyak 10 orang. Sedangkan pemohon yang ditolak, laki-laki sebanyak 7 orang sedang responden perempuan sebanyak 3 orang.

### Tingkat Pendidikan

Tingkat pendidikan responden yang dijadikan sampel mengenai pelaksanaan proses Penerbitan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor Duplikat Direktorat Lalu Lintas Kepolisian Daerah Riau, untuk dapat lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

**Tabel 1.3 Tingkat Pendidikan Responden**

No	Responden	Tingkat pendidikan				Jumlah
		Tamat SLTP	Tamat SMU	Diploma	Strata 1	
1	Kepala Seksi BPKB	-	-	-	1 (100%)	1 (100%)
2	Paur Si BPKB	-	1 (100%)	-	-	1 (100%)
3	Pamin Si BPKB	-	1 (50%)	-	1 (50%)	2 (100%)
4	Polresta	-	-	-	1 (50%)	1 (100%)
5	Polsek	-	-	1 (50%)	1 (50%)	2 (100%)
6	Pimpinan Media cetak	-	1 (50%)	-	-	1 (100%)
7	Pemohon Diterima	5 (20%)	15 (60%)	3 (12%)	2 (8%)	25 (100%)
8	Pemohon Ditolak	5 (50%)	5 (50%)	-	-	10 (100%)
Jumlah		10 (23,26%)	23 (53,49%)	4 (9,3%)	6 (13,95%)	43 (100%)

Sumber : Data olahan Penelitian 2011

Dari tabel 3.2 diatas dapat diketahui bahwa 10 orang responden tamat SLTP dengan persentase (23,26%) dan 23 responden tamat SMU dengan persentase (53,49%) kemudian tamat Diploma sebanyak 4 orang dengan persentase (9,3%), kemudian 6 orang responden tamat strata 1 dengan persentase (13,95%), dengan demikian dapat dikatakan seluruh responden berpendidikan minimal tamatan SLTP.

## **B. Pelaksanaan Proses Penerbitan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor Duplikat Direktorat Lalu Lintas Kepolisian Daerah Riau Tahun 2011**

Adapun proses dalam penerbitan buku pemilik kendaraan bermotor duplikat tersebut melalui 10 tahap yaitu :

1. Pemohon Dengan Persyaratan Lengkap
2. Pengecekan Data Blokir
3. Loker Pendaftaran
4. Registrasi BPKB
5. Pengetikan BPKB
6. Verifikasi dan Paraf
7. Mematikan Register BPKB Lama
8. Pengesahan BPKB (Penandatanganan BPKB)
9. Pemisahan Berkas BPKB
10. Penyerahan BPKB

### **SIMPULAN**

Hasil penelitian yang dilakukan mengenai pelaksanaan proses penerbitan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor Duplikat Direktorat Lalu Lintas Polda Riau sesuai dengan indikator berada pada kategori cukup baik dengan rincian masing-masing indikator adalah : pada loket pemohon dengan persyaratan lengkap dikategorikan “kurang baik” (67,4%), pengecekan data blokir “kurang baik” (67,4%), loket pendaftaran BPKB “kurang baik” (60,1%), registrasi BPKB “kurang baik” (53,3%), pengetikan BPKB “kurang baik” (51,2%), Pada proses verifikasi dan paraf “kurang baik” (67,4%). Mematikan Register BPKB lama “kurang baik” (67,4%), pengesahan BPKB “kurang baik” (65,1%). Selanjutnya, proses pemisahan berkas BPKB berada pada kategori “kurang baik” dengan persentase 65,1% dan kemudian pada tahap akhir, penyerahan BPKB “kurang baik” (67,4%) untuk diberikan kepada pemohon dengan persyaratan lengkap.

Hasil penelitian yang dilakukan mengenai pelaksanaan proses Penerbitan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor Duplikat Direktorat Lalu Lintas Polda Riau ternyata belum efektif atau belum memberikan pelayanan yang cukup maksimal kepada masyarakat.masih banyak ditemukan proses atau prosedur yang memberatkan kepada masyarakat.

Pelaksanaan Proses Penerbitan Buku Pemilik kendaraan Bermotor Duplikat melalui proses yang diharapkan mempunyai standar waktu dan kualitas hasil pelayanan yang baik melalui berbagai pembenahan baik sarana dan prasarana maupun sumber daya manusia/ personil-personil petugas diharapkan pelayanan Proses Penerbitan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor Duplikat Direktorat Lalu Lintas Polda Riau kedepannya jauh lebih baik.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Said Zainal, 2006. *Kebijakan Publik, Edisi Revisi Cetakan Ke-3*. Jakarta: Suara Bebas
- Agustino Leo. 2006. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik, Implementasi Kebijakan*. Bandung; Alfabeta.
- Bambang Hendarso, 2009, *Formulasi Remunerasi Di Lingkungan Polri Dalam Meraih Quick Wins*, Tulisan Komisi Kepolisian, Jakarta.
- Bungin, Burhan, 2001. *Metedologi Penelitian Kualitatif*, Jakarta, RajaGrafindo, Persada,
- George. R. Terry dalam Muchsan, 1992, *Sistem Pengawasan terhadap Perbuatan Aparat Pemerintah dan Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta.
- Ibrahim, Amin, 2004, *Pokok-Pokok Analisis Kebijakan Publik*, Bandung : Mandiri maju.
- Irfan Islamy, 2000. *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara*, Bumi Aksara, Jakarta
- Muhadjir, Noeng. 2000. *Kebijakan dan Perencanaan Sosial Yogyakarta : Rake sarasin*.
- Nugroho, Riant, 2008, *Public Policy: Teori Kebijakan – Analisis Kebijakan – Proses Kebijakan Perumusan, Implementasi, Evaluasi, Revisi Risk Management dalam Kebijakan Publik, Kebijakan sebagai The Fifth Estate – Metode Penelitian Kebijakan*, Elex Media Komputindo, Kelompok Gramedia, Jakarta;
- <http://www.inikabarku.com/2012/08/prosedur-pembuatan-bpkb-duplikat.html>
- Dunn, William dan Thomas R. D. ye 2000. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, (terjemahan), GadjahMada University Press, edisi ke dua, cetakan ke empat; Yogyakarta.
- Parson, Wayne, 2005, *Publik Policy : Pengantar Teori dan Praktik Kebijakan Publik*, Tri Wibowo Budi Santoso (Terj.).Kencana.
- Putra, Fadilah.2005, *Kebijakan Tidak untuk Publik*. Yogyakarta: Resist Books.
- Shapiro, Ian, 2003. *Asas Moral dalam Politik*. Theresia Wuryantari, dkk (Terj.).

Yayasan Obor dan Freedom Institute.

Subarsono, 2006, *Analisis Kebijakan Publik, konsep, teori dan aplikasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Suharto, 2008, *Analisis Kebijakan Publik*, Bandung, Edisi Revisi Alfabeta.

Surya Fermana, 2009, *Kebijakan Publik Sebuah Tinjauan filosofis*, Ar-Ruzz Media, Jakarta

#### **A. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-undang No.2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2010 Tentang Jenis dan Tarif Penerimaan Bukan Pajak yang Berlaku Pada Kepolisian Republik Indonesia.

Surat Keputusan Kapolda Riau Nomor : Skep/225/IX/2010 Tanggal 20 September 2010 Tentang Pedoman Penomoran Kendaraan Bermotor di Lingkungan Direktorat Lalu Lintas Kepolisian Daerah Riau.

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 Tentang Kendaraan dan Pengemudi

Keputusan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara (Menpan) Nomor 81 Tahun 1983 Tentang pedoman Tata Laksana Pelayanan umum

Surat Keputusan Kapolda Riau Nomor : Skep/225/IX/2010 Tanggal 20 September 2010 Tentang Pedoman Penomoran Kendaraan Bermotor di Lingkungan Direktorat Lalu Lintas Kepolisian Daerah Riau.

Surat Keputusan Kapolda Riau Nomor : B1109/IV/2010/Ditlantas Tanggal 23 April 2010 Tentang Penerapan Online Sistem Reg Ident Ranmor Samsat Pekanbaru Kota.

Rencana Kerja Direktorat Lalu Lintas Polda Riau Tahun 2010 bidang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor.